



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

Manajemen Risiko 2025

Laporan Triwulan II 2025

JULI 2025



ꦱꦶꦩꦶꦤꦶꦏꦠꦤꦠꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦥꦱꦂ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ꦧꦢꦤꦥꦺꦤꦢꦤꦠꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦥꦱꦂ

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Jalan Letda Tantular No. 12 Denpasar., Telp. (0361) 239079,239080,Fax. (0361) 261246

Laporan Triwulan II Tahun 2025

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Kota Denpasar

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan Penilaian Risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko,

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah Kota Denpasar selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar. Pengelolaan Risiko di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar subunsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan.

SPIP terdiri lima unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam metodologi maupun dalam implementasinya.

Metode analisis risiko belum banyak dikembangkan di dalam SPIP. Demikian pula lemah dalam implementasi yang mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pengelolaan maupun pemantauan risikonya

Dasar Hukum

Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar.
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Manajemen Risiko

Maksud dari manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar (Bapenda) Kota Denpasar adalah untuk penataan dalam pengelolaan resiko dengan tatanan manajemen risiko dapat mengefektifitas dan mengefisiensikan permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap kegiatan tugas-tugas dengan meminimalisasi risiko yang terjadi.

2. Tujuan dari Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar adalah dengan adanya manajemen risiko dapat untuk dijadikan sebagai tatanan identifikasi dan analisa dalam permasalahan suatu kegiatan tugas-tugas dan selanjutnya dapat disolusikan langkah-langkah dalam rencana tindak pengendalian untuk meminimalisasi risiko.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penilaian Risiko meliputi Sekretariat, seluruh Bidang dan UPT Pengelolaan Pajak Daerah/BPHTB yang berada di lingkungan Bapenda Kota Denpasar yang terdiri dari:

1. Sekretariat
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5. UPT Pengelolaan Pajak Daerah

BAB II
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut;

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 65 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1 - Hasil Analisis Risiko.**

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 65 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (4% dari 49 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2 – Daftar Risiko Prioritas PEMDA**
- b. Sebanyak 17 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 49 Risiko atau 35% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA**

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Triwulan II sebanyak 4 (empat) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4. - RTP atas Hasil Identifikasi Risiko PEMDA**
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Triwulan II sebanyak 4 atau 100% dari 4 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5 -**

Rencana Dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan PEMDA

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasarannya menghadapi banyak tantangan, kendala atau hambatan, baik kecil maupun besar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah.

Hambatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut;

1. Belum maksimalnya indeks kepuasan masyarakat dalam satu periode tahun 2025
2. Belum dapat dilaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak secara maksimal namun hanya dilakukan secara simple dalam potensi pajak besar.
3. Kurang maksimalnya daya serap kegiatan program dan kegiatan sehingga identifikasi manajemen risiko menjadi belum maksimal.
4. Capaian target dilakukan belum maksimal dikarenakan target anggaran sebagaimana dampak kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum cukup baik dengan pengaruh transisi pertumbuhan perekonomian.

BAB I

Monitoring Risiko dan RTP

Monitoring terhadap pengelolaan risiko dan RTP oleh UPR pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut;

Terdapat 17 kejadian risiko yang muncul pada Triwulan II. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6 - Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) Dan Pelaksanaan RTP**

Rencana Tindak pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan SPIP antara lain penegakan integritasi, kompetensi SDM, dan komitmen pimpinan. Hasil analisis risiko menyimpulkan beberapa risiko atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah meliputi pelaksanaan, pelaporan, pembayaran, evaluasi yang selanjutnya akan menjadi prioritas rencana kegiatan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Nama Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah	Pelaksanaan laporan secara berkala rutin setiap hari pada masing-masing ASN dan Non ASN	Bapenda	1 Tahun
		2 Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang pajak daerah	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya risiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun

No	Program/ Kegiatan	Nama Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	
		3	Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah	Adanya monev melalui pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian Pajak Daerah secara maksimal	Bapenda	1 Tahun

BAB V

Penutup

Demikian dapat kami sampaikan Laporan Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Diharapkan dengan tersusunnya manajemen risiko pada Bapenda Kota Denpasar nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian ditingkat entitas dan tingkat kegiatan dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

=

Denpasar, 22 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. I. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RSP.25.37.31.01	4	4	16
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	RSP.25.37.31.02	4	3	12
3	Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah	RSP.25.37.31.03	3	3	9
4	Kesalahan perhitungan pembayaran pajak daerah sehingga berdampak pada kelebihan atau kekurangan dalam perhitungan SKPD	RSP.25.37.31.04	2	2	4
5	Penggunaan Teknologi pajak daerah dan retribusi daerah belum terintegrasi	RSP.25.37.31.05	2	2	4
6	Belum optimalnya pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terlaksana	RSP.25.37.31.06	2	2	4
7	Kualitas SDM pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas	RSP.25.37.31.07	2	2	4
8	terjadinya gratifikasi dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN	RSP.25.37.31.08	2	2	4
II	Risiko Strategis OPD				
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar					
1	Kesalahan perencanaan penetapan target dan retribusi pajak daerah	RSO.25.37.31.01	4	4	16
2	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RSO.25.37.31.02	3	4	12

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
3	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	RSO.25.37.31.03	3	3	9
4	Terjadinya gratifikasi dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN	RSO.25.37.31.04	3	2	6
5	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	RSO.25.37.31.05	3	2	6
6	Penggunaan Teknologi pajak daerah dan retribusi daerah belum terintegrasi	RSO.25.37.31.06	2	2	4
7	Belum optimalnya pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terlaksana	RSO.25.37.31.07	2	2	4
8	Kualitas SDM pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas	RSO.25.37.31.08	2	2	4
III	Risiko Operasional OPD				
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar					
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah	RF. 25.37.31.01	3	3	9
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang pajak daerah	RF. 25.37.31.02	3	3	9
3	Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah	RF. 25.37.31.03	3	3	9
4	terjadinya gratifikasi dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN	RF. 25.37.31.04	3	3	9
5	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	RF. 25.37.31.05	3	3	9
6	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan Pengadaan BMD	RF. 25.37.31.06	3	3	9

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
7	Calon penyedia memberikan gratifikasi pada pejabat berwenang saat penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	RF. 25.37.31.07	3	3	9
8	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.08	3	3	9
9	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	RF. 25.37.31.09	3	3	9
10	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.10	3	3	9
11	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD	RF. 25.37.31.11	3	3	9
12	terjadi gratifikasi dalam penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	RF. 25.37.31.12	3	3	9
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.13	3	3	9
14	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	ROO.25.37.31.01	3	3	9
15	Kualitas SDM pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas	ROO.25.37.31.02	3	3	9
16	Kesalahan perhitungan pembayaran pajak daerah sehingga berdampak pada kelebihan atau kekurangan dalam perhitungan SKPD	ROO.25.37.31.03	2	3	6
17	Penggunaan Teknologi pajak daerah dan retribusi daerah belum terintegrasi	ROO.25.37.31.04	2	3	6
18	Tidak sepenuhnya pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terlaksana	ROO.25.37.31.05	2	3	6

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
19	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai penagih pajak daerah	ROO.25.37.31.06	2	3	6
20	Kurangnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.37.31.07	2	3	6
21	Kurangnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.37.31.08	2	3	6
22	Kurangnya SDM dalam pengelolaan dan Pemenuhan Barang Milik daerah sehingga kegiatan kantor menjadi terhambat	ROO.25.37.31.09	2	3	6
23	Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu	ROO.25.37.31.10	2	2	4
24	Ketidaktepatan waktu dalam Penetapan Perda APBD dan Perwali Penjabaran APBD	ROO.25.37.31.11	2	2	4
25	Kesalahan dalam penginputan pendapatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan kesalahan memasukkan kode rekening atas kebutuhan kegiatan pada	ROO.25.37.31.12	2	2	4
26	Kesalahan dalam penghitungan target pajak daerah	ROO.25.37.31.13	2	2	4
27	Tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan yang maksimal	ROO.25.37.31.14	2	2	4
28	Sebagian besar Data base wajib pajak belum berbasis NIK sehingga kesulitan dalam melakukan sinkronisasi data dan integrasi	ROO.25.37.31.15	2	2	4
29	Adanya STPD yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak	ROO.25.37.31.16	2	2	4
30	Adanya kesalahan perhitungan pelaporan dan pembayaran pajak daerah	ROO.25.37.31.17	2	2	4

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
31	Penggelapan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak	ROO.25.37.31.18	2	2	4
32	Adanya kesalahan dalam perhitungan pembayaran pajak daerah sehingga berdampak pada kelebihan atau kekurangan dalam penerbitan STPD	ROO.25.37.31.19	2	2	4
33	Penentuan nilai pajak tidak sesuai dengan nilai laporan riil	ROO.25.37.31.20	2	2	4
34	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan ASN	ROO.25.37.31.21	2	1	2
35	Adanya penundaan proses penerbitan SP2D	ROO.25.37.31.22	2	1	2
36	Kesalahan pada pengajuan SPP LS, GU, dan TU sehingga berdampak pada penerbitan SP2D	ROO.25.37.31.23	2	1	2
37	Waktu pengamprahan SPJ tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan	ROO.25.37.31.25	2	1	2
38	Adanya kesalahan pada saat pengamprahan kelebihan dana maupun volume belanja sehingga berdampak pada pengembalian ke Kas Daerah	ROO.25.37.31.25	2	1	2
39	Kurangnya ketersediaan peralatan kebersihan kantor	ROO.25.37.31.26	2	1	2
40	Kurangnya ketersediaan bahan logistik kantor (aci-aci/sesajen)	ROO.25.37.31.27	2	1	2
41	Kurangnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	ROO.25.37.31.28	2	1	2
42	Tidak tersedianya bahan bacaan/koran	ROO.25.37.31.29	1	1	1

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
43	Penyelenggaraan rapat yang dilakukan dengan zoom meeting	ROO.25.37.31.30	1	1	1
44	Kurangnya SDM dalam pengelolaan dan Pemenuhan Barang Milik daerah sehingga kegiatan kantor menjadi terhambat	ROO.25.37.31.31	1	1	1
45	Tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan yang maksimal	ROO.25.37.31.32	1	1	1
46	Kelalaian dan ketidakcakapan entitas pengadaan dalam mengelola kesulitan teknis di lapangan	ROO.25.37.31.33	3	2	6
47	Kelalaian dan /atau perlakuan buruk (moral hazard) dari pihak penyedia barang/jasa	ROO.25.37.31.34	2	2	4
48	Product research dan contract management lemah	ROO.25.37.31.35	2	2	4
49	Ketidakcakapan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa	ROO.25.37.31.36	2	2	4

Kriteria Risiko

Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang	1	Tidak
2	Kemungkinan Kecil	2	Kurang signifikan/kecil
3	Kemungkinan Besar	3	Sedang/Medium
4	Hampir Pasti	4	Signifikan / Besar
5	Pasti	5	Sangat

Denpasar, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RSP.25.37.31.01	16	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Penetapan target pajak dan retribusi daerah kurang relevan dengan tidak memperhatikan perkembangan ekonomi secara mikro dan makro	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	RSP.25.37.31.02	12	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Proses penagihan piutang pajak dan retribusi belum optimal dan terukur	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai
II	Risiko Strategis OPD					
1	Kesalahan perencanaan penetapan target dan retribusi pajak daerah	RSO.25.37.31.01	16	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1.Kurangnya informasi yang valid terkait potensi pajak dan retribusi daerah 2.Kondisi makro ekonomi dengan beragam anggapan ekonomi (ceteris paribus) 3. Diluar kemampuan (force majeure) dalam penentuan estimasi target	Hilangnya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah'
2	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	RSO.25.37.31.02	12	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kurangnya SDM dan data mapping WP tidak valid	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai

Denpasar, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. H. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2025 : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda	RSP.25.37.31.01	Penerapan sistem informasi dan pelayanan yang lebih optimal dan penerapan atas regulasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Pemerintah Kota Denpasar - Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun
		RSP.25.37.31.02	Adanya Monev melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Pajak Daerah secara maksimal	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dalam penerimaan pajak daerah dan belanja daerah tetap secara non tunai	Pemerintah Kota Denpasar - Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun
II	Risiko Strategis OPD	RSO.25.37.31.01	Penerapan sistem informasi dan pelayanan yang lebih optimal dan penerapan atas regulasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan laporan secara berkala, rutin setiap hari pada masing – masing PNS dan Non PNS	Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun
		RSO.25.37.31.02	Adanya Monev melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Pajak Daerah secara maksimal	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan seperti Laporan Realisasi Anggaran Tepra fisik dan keuangan setiap awal bulan kepada pimpinan	Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun
II	Risiko Operasional OPD	RF. 25.37.31.01	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan laporan secara berkala, rutin setiap hari pada masing – masing PNS dan Non PNS	Kabid Pengelolaan Patda dan Kasubid Penetapan dan Pendaftaran	1 Tahun
		RF. 25.37.31.02	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang pajak daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan	Kabid Penagihan dan Keberatan dan Kasubid Perhitungan dan Keberatan	1 Tahun
		RF. 25.37.31.03	Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dalam penerimaan pajak daerah dan belanja daerah tetap secara non tunai	Kabid Penagihan dan Keberatan dan Kasubid Perhitungan dan Keberatan	1 Tahun
		RF. 25.37.31.04	terjadinya gratifikasi dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan seperti Laporan Realisasi Anggaran Tepra fisik dan keuangan setiap awal bulan kepada pimpinan	Kasubag Umum dan Keuangan, Bendahara beserta JFT Perencana di Bapenda Kota Denpasa	1 Tahun
		RF. 25.37.31.05	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun
		RF. 25.37.31.06	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan Pengadaan BMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kualitas review dan evaluasi dokumen perencanaan serta monitoring dan Evaluasi kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan	1 Tahun
		RF. 25.37.31.07	Calon penyedia memberikan gratifikasi pada pejabat berwenang saat penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun
		RF. 25.37.31.08	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penelitian dan/atau pemerhatian penyusunan anggaran secara berjenjang dan berkala 2. Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan, Bendahara beserta JFT Perencana di Bapenda Kota Denpasa	1 Tahun
		RF. 25.37.31.09	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun
		RF. 25.37.31.10	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun
		RF. 25.37.31.11	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Barang Milik Daerah serta mengadakan monev secara berkala	Benturan kepentingan dalam pengadaan (Tahap Perencanaan)	1 Tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
		RF. 25.37.31.12	terjadi gratifikasi dalam penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bapenda	1 Tahun
		RF. 25.37.31.13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penelitian dan/atau pencermatan penyusunan anggaran secara berjenjang dan berkala 2. Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan	1 Tahun



Denpasar, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2025 : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan					
No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Strategis Pemda							
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Laporan 2. Rapat 3. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Tindakan Pelaksanaan	Bapenda Kota Denpasar	Masyarakat (Wajib Pajak)	1 Tahun	1 Tahun	RTP sudah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	1. Laporan 2. Rapat 3. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Tindakan Pelaksanaan	Bapenda Kota Denpasar	Masyarakat (Wajib Pajak)	1 Tahun	1 Tahun	RTP sudah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP
Risiko Strategis OPD							
1	Kesalahan perencanaan penetapan target dan retribusi pajak daerah	1. Laporan 2. Rapat 3. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Tindakan Pelaksanaan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Masyarakat (Wajib Pajak)	1 Tahun	1 Tahun	RTP sudah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP
2	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	1. Laporan 2. Rapat 3. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Tindakan Pelaksanaan	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Masyarakat (Wajib Pajak)	1 Tahun	1 Tahun	RTP sudah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP

Denpasar, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Strategis Pemda					
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Informasi 2. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Monev	Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	1. Informasi 2. Regulasi/ aturan yang berlaku	Bapenda Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
	Risiko Strategis OPD					
1	Kesalahan perencanaan penetapan target dan retribusi pajak daerah	1. Informasi 2. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Monev	Bidang Perencana dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	
2	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	1. Informasi 2. Regulasi/ aturan yang berlaku 3. Monev	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	



Denpasar, 27 Desember 2024
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kota Denpasar

Dr. H. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar										
Tahun Penilaian : 2025										
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah										
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I Risiko Strategis Pemda										
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RSP.25.37.31.01	Jan-25	Penetapan target pajak dan retribusi daerah kurang relevan dengan tidak memperhatikan perkembangan ekonomi secara mikro dan makro	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan dengan meminimalisir terjadinya resiko tetap dilakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara	RTP sudah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP	
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang Pajak Daerah	RSP.25.37.31.02	Jan-25	Proses penagihan piutang pajak dan retribusi belum optimal dan terukur	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dalam penerimaan pajak daerah dan belanja daerah tetap secara non tunai	RTP telah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP	
II Risiko Strategis OPD										
1	Kesalahan perencanaan penetapan target dan retribusi pajak daerah	RSO.25.37.31.01	Jan-25	Penetapan target pajak dan retribusi daerah kurang relevan dengan tidak memperhatikan perkembangan ekonomi secara mikro dan makro	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan laporan secara berkala, rutin setiap hari pada masing – masing PNS dan Non PNS	RTP telah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP	
2	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang karena data tidak valid	RSO.25.37.31.02	Jan-25	Proses penagihan piutang pajak dan retribusi belum optimal dan terukur	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan seperti Laporan Realisasi Anggaran Tepra fisik dan keuangan setiap awal bulan kepada pimpinan	RTP telah dilaksanakan dan sudah mampu mengurangi dampak risiko tersebut,namun belum dilaksanakan pengukuran terhadap RTP	
III Risiko Operasional OPD										
1	Benturan kepentingan dalam perencanaan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah	RF. 25.37.31.01	Jan-25	Kurangnya informasi yang valid terkait potensi pajak dan retribusi daerah	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Mencermati dan meminimalisasi ketidaksesuaian perencanaan target	Pelaksanaan laporan secara berkala, rutin setiap hari pada masing – masing PNS dan Non PNS	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
2	Belum optimalnya realisasi pembayaran piutang pajak daerah	RF. 25.37.31.02	Jan-25	Proses penagihan pajak dan retribusi belum berjalan dengan baik dan terukur	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Penerapan sistem informasi dan pelayanan yang lebih optimal dan penerapan atas regulasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
3	Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah	RF. 25.37.31.03	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi	penagihan piutang pajak daerah yang tidak optimal		Adanya Monev melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Pajak Daerah secara maksimal	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
4	terjadinya gratifikasi dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN	RF. 25.37.31.04	Jan-25	Lemahnya pengawasan	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja		1. SOP Sistem penggantian dan Tunjangan ASN 2. Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peratyrab Pemerintah No 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
5	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	RF. 25.37.31.05	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		1. SOP Sistem penggantian dan Tunjangan ASN 2. Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peratyrab Pemerintah No 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
6	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan Pengadaan BMD	RF. 25.37.31.06	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja		Pakta Integritas dalam pengelolaan APBD Mendata dan menyusun daftar kerusakan Barang Milik Daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
7	Calon penyedia memberikan gratifikasi pada pejabat berwenang saat penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	RF. 25.37.31.07	Jan-25	Ketidaksesuaian atas kebutuhan pemeliharaan yang maksimal	Kurang relevannya potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai		Dengan menyesuaikan kebutuhan atas barang Milik daerah terhadap penganggaran	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
8	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.08	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan serta mencari keuntungan pribadi	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal serta berpotensi menimbulkan kerugian negara		Pembuatan SPJ yang sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
9	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	RF. 25.37.31.09	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan serta mencari keuntungan pribadi	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja		Pakta Integritas dalam pengelolaan APBD serta Pakta Integritas Penggunaan BMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
10	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.10	Jan-25	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	1. Reputasi dari pelaku risiko terganggu 2. Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
11	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD	RF. 25.37.31.11	Jan-25	Belum optimalnya penetapan anggaran kas dengan penyelesaian pengadaan barang/jasa serta	capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target		Pencatatan Barang Milik Daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
12	terjadi gratifikasi dalam penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	RF. 25.37.31.12	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal		Pembuatan SPJ yang sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 25.37.31.13	Jan-25	Lemahnya pengawasan dan Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja		Pakta Integritas dalam pengelolaan APBD	Kebijakan dan prosedur pengendalian yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010